

ABSTRAK

Semenjak penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, upah selalu menjadi hal yang tak habis-habisnya dipersoalkan kalangan pekerja. Pro dan kontra dari masyarakat luas berdatangan terutama para pekerja yang menganggap PP ini merugikan pekerja, sebaliknya sebagian besar pengusaha justru menyambut baik usulan itu karena mereka akan dengan mudah menentukan besaran biaya tenaga kerja untuk satu tahun ke depan. Adapun salah satu alasan terhadap penolakan PP tersebut karena serikat pekerja tidak dilibatkan dalam kenaikan upah minimum dan tidak digunakannya lagi indikator kebutuhan hidup layak sebagai elemen utama penghitungan penetapan upah minimum.

Tujuan dari penelitian ini adalah memahami sumbangan filsafat hukum, utamanya kajian pardigmatik, bagi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pemahaman dan penerapan PP 78/2015 tentang Pengupahan dalam rangka meringankan beban pengusaha sekaligus mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Tradisi penelitian kualitatif dan juga paradigma *critical theory et. al.* dipilih sebagai titik pandang serta pedoman yang digunakan dalam penyusunan penelitian hukum ini. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yang didukung dengan wawancara terhadap para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan PP 78/2015 tentang Pengupahan. Metode analisis yang dipakai adalah *analysis content* dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah

Dari hasil penelitian yang didapat, menunjukkan bagaimana pemahaman para informan tentang 1) Maksud sebenarnya dari PP 78/2015 tentang Pengupahan, 2) Penerapan PP 78/2015 tentang Pengupahan, dan 3) Sumbangan filsafat hukum, utamanya kajian pardigmatik, bagi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pemahaman dan penerapan PP 78/2015 tentang Pengupahan dalam rangka meringankan beban pengusaha sekaligus mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam penerapannya, penghitungan upah minimum berdasarkan PP 78/2015 tentang Pengupahan tidak dapat mewujudkan kesejahteraan bagi kalangan pekerja karena tidak dapat meningkatkan taraf hidup pekerja, namun meringankan beban pengusaha karena meningkatkan produktivitas dan kepastian bagi perusahaan. Dan harapan yang muncul adalah rumusan penghitungan upah minimum kedepannya harus memperhitungkan kemampuan dan kelangsungan perusahaan sekaligus juga memperhatikan kesejahteraan pekerja.

Kata kunci : Pengupahan, Kesejahteraan, Paradigma.

ABSTRACT

Since the determination of Government Regulation number 78 year 2015 about The Wage, wages are always a thing that is not inexhaustible questioned among workers. The pros and cons of the wider community arriving especially the workers who consider this government regulation detrimental to workers, otherwise the majority of entrepreneurs actually welcomed the proposal because they will easily determine the cost of labor for the next year. One reason for the rejection of government regulations is because the unions are not involved in the minimum wage increase and no longer use indicators of living needs deserve as the main element of calculating the minimum wage determination.

The purpose of this research is to understand the contribution of legal philosophy, the main paradigmatic study, for the resolution of problems related to the understanding and application of Governmen Regulation number 78 year 2015 about The Wage in order to relieve the burden of entrepreneurs while relizing the welfare of workers.

The tradition of qualitative research and also the paradigm of critical theory et. al. selected as the vantage point and guidelines used in the preparation of this legal research. Collection of data through literature research supported by interviews to stakeholders related to Government Regulation number 78 year 2015 about The Wage. The method of analysis used is the content of analysis and data presentation inn the form of written reports scientifically.

From the results of the research gained, shows how the informant's understanding of:1) The real intent of Government Regulation number 78 year 2015 of The Wage, 2) Application of Government Regulation number 78 year 2015 of The Wage, and 3) Contribution of legal philosophy, the main paradigmatic study, for the resolution of problems related to the understanding and application of Governmen Regulation number 78 year 2015 about The Wage in order to relieve the burden of entrepreneurs while relizing the welfare of workers.

The conclusion of the results of this research is in its implementation, the calculation of the minimum wage based on Government Regulation number 78 year 2015 about The Wage can not realize welfare for workers because it can not improve the life level of workers, but to relieve the burden of interpreneurs because it increases productivity and certainty for the company.

Keyword : Wage, Welfare, Paradigm.